

ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022

Adib Izzuddin

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: adibizzuddin0701@gmail.com

Rossi Indrakorniawan

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: rossiindrakorniawan49@gmail.com

Hastian Akbar Stiarso

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: 151190067@student.upnyk.ac.id

Abstrak

Konflik antara Rusia dan Ukraina, sebelumnya terjadi karena Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea dan terbukti mendukung gerakan separatis di Donbas, Ukraina pada tahun 2014. Setelah tahun 2014, proses resolusi konflik ini sempat mengalami stagnasi. Pada akhirnya di awal tahun 2022, Rusia kemudian memutuskan untuk melakukan invasi terhadap Ukraina dan membuat konflik ini kembali memanas. Dengan memanasnya konflik tersebut di tahun 2022, maka timbullah pertanyaan mengenai bagaimana upaya resolusi konflik yang dilakukan untuk mengakhiri konflik di atas. Tulisan ini akan berfokus pada analisis konflik di tahun 2022 dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut, terutama melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Turki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menunjukkan masalah dalam upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui proses mediasi, serta memberikan saran terhadap proses mediasi yang telah berjalan. Pemaparan akan dilakukan dengan menggunakan pisau analisis teori resolusi konflik *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building*. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik di atas masih mengalami sejumlah kendala yang cukup mendasar, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung keberhasilan suatu praktik mediasi.

Kata kunci: Rusia-Ukraina, Resolusi Konflik, Johan Galtung, Mediasi.

Abstract

The conflict between Russia and Ukraine previously occurred because Russia annexed the Crimea region and was proven to support the separatist movement in Donbas, Ukraine in 2014. After 2014, the conflict resolution process had stagnated. In early 2022, Russia then decided to invade Ukraine and make this conflict heat up again. With the escalation of the conflict in 2022, the question arises as to how the conflict resolution efforts are carried out to overcome the conflict. This paper will focus on the analysis of the conflict in 2022 and the efforts made in resolving the conflict, especially through the negotiation process carried out by Turkey. The purpose of this study is to analyze and show problems in resolving the Russian-Ukrainian conflict through the mediation process, as well as to provide suggestions for the mediation process that has been running. The presentation will be carried out using theoretical analysis of peace conflict resolution, peacemaking, peacekeeping, and peace building. This study shows that the conflict resolution still faces a number of fairly basic obstacles, such as not meeting the requirements that support the success of a mediation practice.

Keywords: Russia-Ukraine, Conflict Resolution, Johan Galtung, Mediation.

PENDAHULUAN

Akar konflik antara Ukraina dan Rusia dapat dilihat setelah Ukraina memperoleh kemerdekaannya di tahun 1991. Sejak saat itu, Ukraina kemudian menjadi salah satu negara satelit Rusia yang mendapat banyak pengaruh dari politisi, oligarki, dan plutokrat dari Rusia. Pemerintah Ukraina kemudian menjadi sangat korup dan tidak efisien dalam menjalankan pemerintahan di sana. Melansir dari laporan *Council of Europe* menyebutkan bahwa Ukraina merupakan negara terkorup di Eropa setelah Rusia. Ukraina menduduki peringkat 130 dari 180 negara berdasarkan *Corruption Perceptions Index (CPI)* 2017 dengan nilai 30 dari 100 (Council Of Europe, 2018). Melihat kondisi yang demikian, rakyat Ukraina kemudian menjalankan Revolusi Oranye yang berlangsung di Ibu kota Kiev dari tahun 2004 sampai tahun 2005.

Secara umum, revolusi itu bertujuan untuk menentang pengaruh politik Rusia di Ukraina serta menuntut agar Ukraina dapat melembagakan demokrasi (Gierczak, 2020). Revolusi Oranye ini membawa Yushchenko menjadi Presiden Ukraina yang baru. Kemenangan Yushchenko menjadi sebuah pukulan telak serta kekalahan yang memalukan bagi Rusia. Hal ini berkaitan dengan Rusia yang mendukung untuk kemenangan Yanukovich. Dibawah Pemerintahan Yushchenko, Ukraina berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia. Akan tetapi, tujuan utama dari Yushchenko adalah melakukan demokratisasi di Ukraina dan meningkatkan perekonomian Ukraina melalui integrasi dengan Uni Eropa (Karatnycky, 2005).

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga disulut oleh perbedaan etnis, linguistik, dan agama masyarakat di dalam negeri Ukraina sendiri. Salah satu perbedaan yang mengarah kepada konflik adalah perbedaan etnis masyarakat Provinsi Donetsk, Luhansk, dan Krimea yang mana mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari negara Rusia. Hal ini berkaitan dengan mayoritas masyarakat di wilayah Luhansk dan Donetsk berbahasa Rusia sehingga mereka memiliki kedekatan dengan Rusia. Perbedaan secara kultural ini ditanggapi oleh pihak Ukraina dengan melakukan upaya Ukrainisasi dimana penduduk di wilayah tersebut dipaksa untuk menggunakan bahasa Ukraina. Upaya Ukrainisasi ini dilakukan karena kedekatan masyarakat di Luhansk dan Donetsk dengan Rusia secara budaya akan berdampak pada meningkatnya pengaruh Rusia di negara mereka. Oleh sebab itu, melalui upaya Ukrainisasi dilakukan untuk mencegah hegemoni Rusia melalui jalur budaya (Shulman, 1998).

Upaya Ukrainisasi ini diperkuat dengan undang-undang bahasa yang baru. Kebijakan ini berisi mengenai ketentuan penggunaan bahasa Ukraina sehingga kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi perlindungan bahasa minoritas. Undang-undang bahasa negara mengharuskan penggunaan bahasa Ukraina di sebagian besar aspek kehidupan publik. Undang-undang tersebut bertujuan untuk merevitalisasi bahasa Ukraina dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat identitas nasional setelah jatuhnya Uni Soviet. Beberapa pejabat menyebutnya penting untuk keamanan nasional Ukraina. Pasal 25 dalam undang-undang ini mengenai media cetak, membuat pengecualian untuk bahasa minoritas tertentu, bahasa Inggris, dan bahasa resmi Uni Eropa, tetapi tidak untuk bahasa Rusia.

Hal tersebut yang menyebabkan kekhawatiran mengenai jaminan bagi penggunaan bahasa minoritas. Senada dengan Komisi Vensia yang merupakan badan penasihat bagi Dewan Eropa untuk masalah konstitusi mengatakan pasal tersebut gagal untuk mencapai keseimbangan yang adil (Denber, 2022). Langkah yang diambil oleh Pemerintah Ukraina dalam mempromosikan bahasa mereka untuk memperkuat identitas nasional mereka merupakan bagian dari hak negara berdaulat. Akan tetapi, hal itu tidak dibenarkan apabila merampas hak bagi penutur bahasa Rusia. Oleh sebab itu, permasalahan ini menjadi dipolitisasi sehubungan dengan aksi militer yang dilakukan oleh Rusia.

Keberadaan undang-undang yang bersifat diskriminatif ini meningkatkan aksi separatisme di Ukraina Timur. Menurut kelompok separtis pro-Rusia berpendapat bahwa

penduduk Ukraina Timur merupakan korban diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia. Hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Rusia untuk kembali memainkan perannya di Ukraina. Pada tahun 2019 Presiden Vladimir Putin menandatangani sebuah perintah penyederhanaan prosedur untuk memperoleh paspor Rusia bagi penduduk wilayah pemberontak Ukraina Timur. Invasi Rusia pada bulan Februari tahun 2022 juga merupakan bagian dari upaya Rusia dalam memainkan peran di Ukraina. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Vladimir Putin yang menyatakan bahwa salah satu motivasinya dalam melakukan invasi adalah melindungi melindungi etnis Rusia dan populasi berbahasa Rusia di Ukraina.

Aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 menandakan konflik terbuka untuk pertama kalinya terjadi antara kedua negara. Konflik itu kemudian diperparah dengan terbuktinya keterlibatan Rusia dalam upaya separatisme di Donetsk dan Luhansk. Ukraina yang meresponnya dengan meminta untuk menjadi bagian dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) juga dianggap tidak membantu proses resolusi konflik yang ada. Tindakan Ukraina ini justru dianggap menjadi sumber masalah baru bagi konflik antara Rusia dan Ukraina (Riegent, 2014). Sejak tahun 2014, hubungan antara Rusia dan Ukraina tidak kunjung membaik. Konflik terbuka yang di mulai pada tahun 2014 itu kemudian menjadi konflik yang seolah membeku karena berbagai upaya resolusi konflik tetap mengalami stagnasi. Salah satu upaya besar dalam penyelesaian konflik ini adalah melalui *Organization for Security and Co-operation in Europe*. Pada saat itu, Prancis dan Jerman yang merupakan anggota OSCE turut berupaya memediasi konflik tersebut. Akan tetapi, kesepakatan antara Rusia dan Ukraina tidak pernah terjalin.

Pada akhirnya, konflik antara kedua negara kembali memanaskan dimana Ukraina dibawah Zelensky meminta kepada Amerika Serikat untuk bergabung dengan NATO. Permintaan ini terjadi setelah di tahun 2021 Rusia menggelar latihan militer besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina. Penumpukan pasukan dan latihan militer tersebut kemudian berujung pada invasi yang dilakukan oleh Rusia ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Invasi Rusia ke Ukraina yang semakin berlarut ini mendorong berbagai upaya penyelesaian konflik. Salah satunya adalah upaya mediasi yang dilakukan oleh Turki dan Israel. Baik Turki maupun Israel harus berhati-hati dalam mencoba menengahi antara Rusia dan Ukraina sebagai keinginan untuk mengasingkan diri dari komunitas internasional atau dari Barat. Tidak ada

yang setuju dengan tindakan Rusia di Ukraina, namun kedua posisi mereka yang beroperasi sebagai kekuatan negosiasi menjadi lebih sulit untuk dicoba dan dipertahankan. Israel menghadapi tekanan dari Ukraina dan masyarakat internasional untuk bergabung dalam sanksi dan mengutuk Rusia atas serangan mereka terhadap peringatan Holocaust Babyn Yar sementara Turki menghadapi tekanan dari NATO untuk mengutuk Rusia. Akan tetapi, upaya mediasi ini mengalami kegagalan sehingga muncul pertanyaan mengapa proses mediasi yang dilakukan gagal.

KERANGKA BERPIKIR

Resolusi konflik menurut Fisher adalah suatu usaha untuk menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut berarti bahwa dalam upaya resolusi konflik, hasil yang berusaha dicapai bukanlah suatu hasil yang berorientasi jangka pendek, tetapi hasil yang berorientasi pada hubungan baik di masa depan. Sejalan dengan pemikiran Fisher tersebut, Johan Galtung, seorang pencetus studi perdamaian dan konflik, merumuskan suatu teori resolusi konflik yang juga memiliki dimensi pada penyelesaian konflik jangka panjang.

Johan Galtung berpendapat bahwa terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam proses resolusi konflik. Salah satu yang ia usulkan adalah resolusi konflik melalui proses *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building*. Ketiga model tersebut merupakan suatu rangkaian proses resolusi konflik yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang meskipun pada setiap model memiliki dimensi yang berbeda antara satu dan lainnya.

Model yang pertama adalah *peacemaking*. Menurut Johan Galtung, perdamaian atau resolusi konflik dapat diwujudkan dengan upaya negosiasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa metode yang digunakan dalam *peacemaking* menurut Galtung antara lain adalah:

1. *Coercive*, dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik yang terjadi dengan pemaksaan secara fisik. Hal ini dapat berbentuk ancaman dan penjatuhan sanksi
2. Litigasi, hal tersebut merupakan metode resolusi konflik yang mengedepankan jalur hukum. Metode resolusi konflik jenis ini sering mendapat kritik karena prosesnya yang memakan banyak waktu.

3. Non-litigasi, metode ini merupakan bentuk penyelesaian konflik melalui lembaga non-peradilan. Representasi dari metode ini adalah negosiasi, mediasi, maupun arbitrase.

Model kedua dalam teori resolusi konflik Johan Galtung adalah *peacekeeping*. *Peacekeeping* sendiri merupakan proses penjagaan keamanan agar tidak terjadi konflik terbuka antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Tujuan dari proses ini antara lain untuk membendung konflik dengan kekerasan agar dampaknya tidak meluas dan semakin parah. Dengan terhentinya konflik terbuka, maka penerapan upaya resolusi konflik jangka panjang akan lebih mudah untuk diimplementasikan.

Model terakhir adalah *peace building*. *Peace building* sendiri merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengembalikan keadaan destruktif akibat dari kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun kembali komunikasi antara pihak yang berkonflik. Menurut Galtung, *peace building* merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan setelah melakukan *peacemaking* dan *peacekeeping*. Hal tersebut karena *peacebuilding* dapat membentuk landasan baru bagi proses resolusi konflik yang berorientasi pada jangka panjang.

Dalam penelitian ini penulis menekankan pada proses *peacemaking* berupa mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu upaya alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan (non-litigasi). Upaya ini sendiri lahir karena lambatnya proses penyelesaian konflik di ruang pengadilan. Dengan pertimbangan biaya, waktu, dan kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, maka mediasi muncul sebagai alternatif penyelesaian konflik yang kemudian terus berkembang hingga saat ini (Korah, 2013). Menurut Garry Goodpaster, dalam proses mediasi, setidaknya terdapat beberapa syarat dasar agar suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur tersebut atau dapat dikatakan bahwa proses negosiasi dapat berfungsi dengan baik. Beberapa syarat tersebut antara lain, para pihak memiliki kekuatan tawar menawar yang sama, para pihak berorientasi pada hubungan di masa yang akan datang, terdapat persoalan yang memungkinkan adanya *trade offs*, terdapat urgensi dalam melakukan proses resolusi konflik, tidak memiliki akar konflik yang berlangsung lama dan mendalam, para pihak dapat berkompromi demi terselesaikannya suatu konflik yang mereka hadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksplanasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis maupun pembaca dalam melihat fenomena, aktivitas, atau proses sosial (Bakry: 2019). Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai alasan suatu fenomena internasional sehingga akan menemukan suatu hipotesis dari fenomena yang terjadi.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode eksplanasi adalah untuk menemukan penjelasan mengenai pertanyaan permasalahan yang diajukan. Dalam menjawab pertanyaan permasalahan, penulis tidak dapat sepenuhnya menggunakan data primer, tetapi mengandalkan data sekunder yang tersedia dan relevan dengan pertanyaan permasalahan. Data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan jawaban mengenai upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mencari sumber data berasal dari buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan situs berita (Fuad: 2014). Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data mengenai proses resolusi konflik dan alternatif penyelesaian dari objek penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai bagaimana proses resolusi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022.

PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Resolusi Konflik

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang meletus sejak bulan Februari tersebut masih belum ditemui harapan akan adanya perdamaian. Meskipun sudah banyak pihak yang terlibat untuk berupaya menghentikan konflik antara kedua negara, namun upaya perdamaian bagi kedua pihak masih belum terlihat. Konflik yang telah terjadi menarik perhatian dunia mengingat dari peran kedua negara yang memiliki korelasi kuat dengan dunia internasional utamanya Uni Eropa dan NATO dimana turut terlibat dalam pecahnya perang dua negara. Sejak pecah perang di Ukraina oleh serangan Rusia pada 24 Februari 2022 dunia internasional lantas memberikan respon keras terhadap tindakan Rusia tersebut. Dalam hal ini dunia internasional memberikan berbagai respon terkait keadaan yang terjadi. Misalnya saja penangguhan keanggotaan Rusia dalam Dewan HAM. (UN, 2022). Selain dari pada itu, respon

lainnya juga diterima oleh Rusia. Seperti pemberian sanksi ekonomi oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya (Al-Jazeera, 2022). Pada sisi lain negara – negara juga berupaya untuk membantu menyelesaikan konflik melalui metode lainnya. Misalnya saja sebagaimana upaya yang dilakukan baru – baru ini berupa pelaksanaan dialog damai atau *peace talks* yang dilaksanakan di Turki.

Pelaksanaan dialog damai yang di mediasi oleh Turki tersebut diselenggarakan pada Maret 2022. Dalam dialog yang diadakan di Turki tersebut, berjalan 2 kali perundingan dimana keduanya belum memberikan hasil yang diinginkan berupa gencatan senjata. Terlebih justru cenderung tidak terdapat kemajuan dalam perundingan yang diadakan tersebut (Jones, 2022). Hal ini terlihat dimana hubungan kedua negara masih memanas dan perang terus berkecamuk. Bahkan meski terdapat perkembangan dalam diskusi dimana Rusia bersedia untuk mengurangi intensitas serangan terhadap Ukraina di wilayah bagian Utara. Serta sebaliknya pada sisi Ukraina menyebutkan bahwa akan berstatus netral terkait dengan hubungannya dengan NATO yang mana menjadi kekhawatiran oleh Rusia (Carter, 2022). Akan tetapi meski demikian gencatan senjata serta meredamnya konflik masih belum bisa terwujud diantara kedua negara.

Upaya menengahi atau menjadi penghubung dalam penyelesaian konflik adalah sebuah hal penting pada resolusi konflik. Mengingat pihak – pihak yang berkonflik akan sulit untuk membangun kembali hubungan apabila tidak terdapat dorongan ataupun bantuan dari pihak lain. Pada kasus konflik Rusia dan Ukraina ini memiliki berbagai faktor penyebab kegagalan dari resolusi konflik ataupun sulitnya penyelesaian masalah. Salah satu penyebabnya adalah mengenai kehadiran penengah konflik yang berperan untuk menghubungkan dan mendamaikan kedua pihak. Demikian dalam hal ini terdapat negara – negara yang berupa untuk membantu menjadi penengah dan menyelesaikan konflik. Dalam hal ini Rusia sendiri sempat mengajukan untuk menjadi penengah konflik. Akan tetapi sebagaimana tindakan Rusia yang *offensive* berupa tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil, penyerangan terhadap rumah sakit, serta rekam jejak terhadap Ukraina (Cunningham, 2022). Tentunya membuat tindakan menjadi penengah adalah hal yang tidak dapat diterima.

Dalam hal ini negara Turki turut berupaya menjadi penengah dalam konflik Rusia dan Ukraina. Turki sendiri memiliki hubungan yang cukup baik antara kedua pihak dimana

meskipun merupakan anggota NATO, akan tetapi hubungan Turki dan Rusia cukup baik. Rusia memiliki arti penting bagi Turki dimana sepertiga impor gas alam pada tahun 2020 berasal dari Rusia serta turut membantu dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (Daniel and Lindenstrauss, 2022). Terlebih hasil gandum, minyak dan bahan bakar juga sebagian besar berasal dari impor negara Rusia. Pada bidang militer, Rusia turut menjadi pilihan dalam tujuan pembelian persenjataan (Pamuk, 2021). Sebaliknya juga hubungan antara Ukraina dan Turki juga harmonis, mengingat keberadaan negara Ukraina tidak kalah penting dengan Rusia. Ukraina menjadi negara penting ketiga bagi Turki, hal ini dikarenakan negara tersebut turut serta menjadi tujuan importir produk gandum beriringan dengan Rusia. Pada sisi lain pula wisatawan Ukraina juga melimpah dimana pada tahun 2021 setidaknya 2 juta warga Ukraina mengunjungi Turki untuk kebutuhan pariwisata (Daniel and Lindenstrauss, 2022). Selain itu tindakan penindasan suku Tatar di Krimea yang merupakan kelompok etnis Turki oleh pemerintah Rusia mendorong hubungan yang lebih mendalam erat antara Ukraina dan Turki. Sehingga demikian ketika meletusnya konflik Rusia dan Ukraina, Turki terlihat lebih cenderung mendukung Ukraina. Hal ini terlihat dimana Turki menjual drone bersenjata terhadap Ukraina dalam konflik perang tersebut dimana memiliki kapabilitas luar biasa dan mematikan (Cook, 2022). Selain dikarenakan pengakuan atas kedaulatan Ukraina beberapa faktor diatas menjadi penyebab Turki bertindak demikian. Namun meski begitu pada dasarnya Turki berupaya bersikap netral dan memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan konflik mengingat arti penting kedua negara tersebut.

Selain akibat penengah konflik yang belum maksimal dan membuahkan hasil, terdapat faktor lain penyebab sulitnya atau gagalnya resolusi konflik Rusia dan Ukraina. Dalam memahami alasan upaya resolusi konflik yang sudah dijalani belum juga membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan akar dari penyebab konflik tersebut belum mampu untuk dipecahkan atau tercapai kesepakatan diantara kedua pihak. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sendiri dilatar belakangi oleh beberapa hal. Klaim yang disebutkan oleh Rusia sendiri konflik yang terjadi diakibatkan oleh adanya rasa kekhawatiran dan terancam terhadap akan bergabungnya Ukraina dengan NATO yang mengancam negara Rusia (Falahi, 2022). Seperti diketahui bersama hubungan antara Rusia dan NATO sendiri cenderung tidak harmonis. NATO sendiri yang mana merupakan pakta pertahanan negara – negara barat era perang dingin tersebut hingga saat ini terlihat masih “bertengkar” dengan Rusia dan terlihat

berupaya menekan kekuatan Rusia. Tindakan ini dikarenakan pada dasarnya NATO sendiri pada awal pendiriannya didirikan untuk menekan pengaruh dari Uni Soviet yang dimasa tersebut memiliki pengaruh besar di dunia (Kramer, 2002). Akan tetapi setelah jatuhnya Uni Soviet, pakta pertahanan NATO tersebut masih tetap bertahan. Dalam sudut pandang Rusia kehadiran dan tindakan dari NATO merupakan sebuah ancaman nyata bagi wilayahnya. Terlebih disebutkan oleh Mikhail Gorbachev ketika terjadi reunifikasi antara Jerman barat dan timur pada tahun 1990 bahwa NATO tidak akan memperluas pengaruh atau melakukan "ekspansi" ke Timur (RIA Novosti, 2009 dalam Ozgoker dan Yilmaz, 2016). Meski begitu NATO pada prakteknya tetap melakukan "ekspansi" ke wilayah timur hingga pada negara – negara tetangga Rusia. Misalnya saja Polandia, Latvia, dan Lituania yang sudah tergabung dengan NATO dan baru – baru ini yang akan bergabung adalah Finlandia dan Ukraina (Haglund, 2022). Sehingga demikian hubungan antara NATO dan Rusia tidak dapat harmonis dan timbul kekhawatiran. Hal ini dikarenakan sejak awal NATO dan Rusia tidak memiliki sejarah hubungan yang relatif baik dan ditambah bergabungnya negara – negara sekitar terhadap NATO membuat Rusia merasa terancam. Rusia seolah – olah terkepung oleh kekuatan NATO melalui negara – negara tetangga yang menjadi anggota pakta pertahanan tersebut.

Demikian dalam hal ini upaya bergabungnya Ukraina bersama dengan NATO ditentang keras oleh Rusia. Selain dikarenakan akan mengancam keamanan Rusia mengingat Ukraina yang sangat dekat dengan Rusia secara geografis dan menjadi "benteng" dari ancaman luar. Ukraina juga memiliki arti penting lainnya bagi negara Rusia itu sendiri. Ukraina adalah wilayah transit atau jalur bagi ekspor energi Rusia ke wilayah Eropa (Ozgoker dan Yilmaz, 2016). Sehingga keberadaan Ukraina sangat penting bagi Rusia sebagai penyambung antara Rusia dan Eropa. Akibatnya Rusia berupaya untuk menjaga Ukraina supaya tetap dekat dan tidak berafiliasi, terlebih bergabung menjadi bagian dari NATO. Apabila hal tersebut terjadi maka tidak hanya ancaman militer yang akan menimpa Rusia melainkan juga ancaman ekonomi dimana Rusia pada akhirnya akan "terkepung" oleh NATO. Oleh karenanya mengetahui akan ancaman tersebut, Rusia melakukan upaya konfrontatif ke wilayah – wilayah sekitar Rusia dengan mengirimkan pasukannya di berbagai area tersebut (Lohschelder, 2016 dalam Ozgoker dan Yilmaz, 2016). Dalam hal ini tindakan Rusia semakin *offensive*. Puncaknya pada tahun Februari 2022 kemudian melancarkan serangan terhadap Ukraina yang dirasa semakin

dekat dengan NATO dan perlu untuk sesegera mungkin diantisipasi melalui operasi militer atau oleh negara barat disebut invasi.

Namun demikian dalam dialog damai di Turki, pihak Ukraina bersedia untuk berposisi netral dengan tidak bergabung terhadap NATO. Akan tetapi Ukraina menginginkan juga adanya pemberian perlindungan keamanan atau *security guarantee* dari negara – negara lain seperti Israel, Kanada, Polandia dan Turki (Carter, 2022). Penyebabnya adalah untuk memberikan jaminan bahwa aksi serupa kedepannya tidak akan terjadi lagi dan Ukraina dapat menerima "rasa aman". Meski begitu dengan pernyataan ketersediaan Ukraina bersikap netral yang sudah disebutkan dalam pertemuan di Turki (Jones, 2022). Konflik yang terjadi tak kunjung menemui titik perdamaian dan perang masih terus berlanjut. Terjadinya peristiwa tersebut tentu sangat disayangkan mengingat adanya pembicaraan damai guna mewujudkan harapan perdamaian namun tidak dapat memberikan kesepakatan untuk berdamai.

Masih berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina meski terdapat ketersediaan dalam tuntutan untuk bersikap netral terhadap NATO. Serta keinginan terkait keinginan melibatkan diri negara – negara lain untuk menjamin keamanan Ukraina tidak mendapatkan penentangan. Mengartikan bahwa terdapat akar konflik yang jauh lebih mendasar dibandingkan hal tersebut dimana menjadi penghambat terkait resolusi konflik. Meskipun dalam pembicaraan tersebut belum terbentuk sebuah kesepakatan mutlak terkait kedua hal tersebut. Namun dengan adanya ketersediaan masing – masing pihak dapat menjadi sebuah langkah progresif terkait upaya penyelesaian konflik (Michaelson, 2022). Selain adanya netralitas Ukraina, negara Rusia juga menginginkan kemerdekaan wilayah Donbas yang berada di bawah kedaulatan Ukraina. Permasalahan terkait kemerdekaan Donbas merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan oleh pihak Ukraina. Donbas adalah wilayah bagian Ukraina dimana dengan memerdekakan daerah tersebut berarti kehilangan sebagian kedaulatan Ukraina dan hal tersebut tidak diinginkan oleh pihak Ukraina (Jones, 2022). Demikian hal ini menjadi penyebab dari sulitnya atau gagalnya resolusi konflik antara kedua pihak. Namun terkait hal ini pihak Ukraina pada pertemuan di negara Turki membuka peluang berkaitan dengan adanya pembicaraan mengenai permasalahan tersebut (Carter, 2022). Dalam artian bahwa Ukraina dapat masih menerima upaya untuk mendiskusikan permasalahan tersebut guna mencapai pada terwujudnya perdamaian.

Meski demikian hingga berakhirnya *peace talk* di Turki tersebut belum juga terdapat kesepakatan damai atau setidaknya gencatan senjata. Hal ini dikarenakan tuntutan yang ada di kedua belah pihak belum dapat terpenuhi dengan baik. Secara garis besar Rusia akan menghentikan tindakan militernya apabila keinginannya seperti Ukraina bersikap netral terhadap NATO secara konstituen, mengakui Krimea dan memberikan kemerdekaan kepada Donbas (Donetsk dan Luhansk) (Harding, 2022). Akan tetapi Ukraina sendiri dalam pembicaraan dan pertemuan yang digelar bersama dengan Rusia hanya mampu "memenuhi" sebagian dari tuntutan yang ada. Utamanya terkait dengan netralitas terhadap NATO dengan syarat bahwa negara lain dapat memberikan bantuan dan terlibat untuk menyediakan keamanan bagi negara Ukraina dan penghentian operasi militer akan dapat dilaksanakan sebagaimana, penurunan intensitas serangan yang dilakukan terhadap Ukraina. Sehingga demikian pada dasarnya yang menjadi penyebab dari sulitnya resolusi konflik yang ada adalah dari tuntutan pihak - pihak. Utamanya oleh Rusia sangat merugikan Ukraina. Mengingat kedulatan yang dimiliki oleh Ukraina diharapkan untuk dilepaskan sebagian, dengan memberikan kemerdekaan terhadap Donbas. Hal tersebut sangat tidak bisa diterima oleh Ukraina dimana pihak Ukraina tidak akan setuju terkait dengan gencatan senjata atau penghentian perang apabila harus kehilangan sebagian wilayahnya (Tondo, 2022). Oleh karenanya resolusi konflik terkait dengan konflik kedua negara ini akan sulit diraih apabila tidak terdapat perubahan tuntutan dan kesepakatan.

Selain terkait dengan tuntutan masing – masing pihak yang masih belum menemui kesepakatan, terdapat pula faktor yang menyebabkan proses resolusi konflik sulit tercapai atau cenderung gagal. Dalam hal ini, masing – masing pihak baik Ukraina maupun Rusia berada pada tahap hubungan yang sangat kritis dimana kekhawatiran serta kecurigaan antar pihak sangat besar. Sehingga berbagai upaya penjalinan hubungan baik tidak dapat terlaksana, akibatnya perang yang ada terus terjadi. Adanya ketidakpercayaan yang dimiliki antar masing – masing pihak menyebabkan itikad atau komitmen baik yang coba untuk ditunjukkan akan tetap di tanggapi dengan kurang baik. Mengingat dasar dari pembangunan resolusi konflik adalah hubungan itu sendiri dengan tidak terjalinnya hubungan yang baik maka menyebabkan resolusi konflik sulit tercapai

Opini Penyelesaian

Dalam sebuah hubungan antar negara, suatu konflik merupakan sebuah hal alami yang terjadi. Hal ini dikarenakan setiap aktor dalam hal ini negara memiliki kepentingan serta tujuan yang berbeda – beda antara satu dengan yang lainnya. Demikian peluang akan adanya konflik akan terus ada. Scannell menyebutkan bahwa konflik merupakan hal alami dalam kehidupan dimana timbul dikarenakan perbedaan persepsi, tujuan maupun nilai dalam sekelompok individu (Suhardono, 2015: 3). Namun demikian beberapa konflik membawa dampak buruk dan menyebabkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Perang adalah salah satu bentuk konflik dimana membawa kehancuran bagi banyak bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak dapat berjalan bahkan cenderung “rusak” karena adanya perang.

Sehubungan dengan itu resolusi konflik menjadi hal yang penting untuk dipahami. Fisher menjelaskan resolusi konflik sebagai upaya untuk mengatasi akar konflik dan berusaha membentuk sebuah hubungan baru yang dapat bertahan lama di antara pihak – pihak yang berkonflik (Suhardono, 2015: 5). Pemahaman mengenai akar penyebab konflik adalah hal utama dalam resolusi konflik dimana akar tersebut menjadi sebuah kunci konflik dapat diselesaikan.

Galtung menjelaskan bahwa dalam resolusi konflik terbagi menjadi tiga tahapan yakni *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. *Peacemaking* sendiri merupakan upaya menangani penyebab konflik dengan membentuk sebuah hubungan komunikasi serta

negosiasi antara pihak yang berkonflik. Kemudian *peacekeeping* merupakan proses menjaga perdamaian yang telah terbentuk melalui komitmen dari pihak – pihak yang terlibat. Lantas *peace building* adalah pengimplementasian konstruksi sosial, politik serta ekonomi yang terbentuk dan disepakati untuk mempertahankan perdamaian. Melalui tahapan – tahapan tersebut diharapkan dapat menciptakan situasi *negative peace (absence of violence and war)* (Jemadu, 2008). Konflik Ukraina dan Rusia merupakan konflik yang terjadi diakibatkan beberapa faktor, salah satunya adalah peristiwa masa lalu berupa aneksasi Krimea dan dukungan Rusia terhadap separatist Donbass menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis. Dalam hal ini berdasarkan teori Galtung mengenai pendekatan penyelesaian konflik melalui *peacemaking, peacekeeping* dan *peace building*, upaya *peacemaking* melalui mediasi seharusnya tetap menjadi alternatif utama dalam melakukan penyelesaian konflik.

Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu kembali diupayakan oleh pihak-pihak terkait untuk memperluas dan memenuhi syarat-syarat dasar agar proses mediasi dapat berjalan secara optimal. Pertama, Rusia dan Ukraina harus tetap melakukan *trade-off* dalam bentuk apapun, serta melakukan perjanjian dalam hal-hal yang tidak terlalu krusial sebanyak-banyaknya. Dari mediasi yang dilakukan oleh Turki, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa hal krusial yang sangat sulit untuk dinegosiasikan, seperti contoh terkait dengan gencatan senjata. Akan tetapi, jika hal-hal krusial tersebut tidak dapat dirundingkan melalui mediasi saat ini, maka akan lebih baik jika kedua negara tetap melakukan negosiasi dengan mengalihkan ke topik-topik yang lain. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya memperbesar ruang *trade-off* bagi kedua negara sehingga diharapkan pada masa yang akan datang, pembahasan mengenai hal-hal yang lebih krusial akan berjalan lebih mudah.

Upaya kedua adalah dengan menyamakan posisi tawar Ukraina terhadap Rusia. Salah satu upaya yang perlu ditingkatkan dalam hal ini adalah dengan melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi terhadap ekonomi tersebut diharapkan membuat ekonomi Rusia terguncang sehingga posisi tawar Rusia akan turun. Sanksi ekonomi yang diberikan kepada Rusia secara cepat atau lambat akan mempengaruhi kondisi dalam negeri mereka. Kondisi dalam negeri yang penuh dengan tekanan akan memungkinkan terjadinya sebuah krisis sehingga akan mengubah arah kebijakan luar negeri Rusia. Sanksi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan karena kondisi ekonomi Rusia terguncang pasca sanksi dari Barat dijatuhkan.

Kondisi tersebut dibuktikan dengan Rusia mulai memangkas produksi minyak mereka sebesar 9 persen. Selain itu, inflasi di Rusia naik secara tajam dimana pada bulan Maret saja indeks harga konsumen naik sebesar 7,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan analisa dari Bank Sentral Rusia diperkirakan inflasi akan menyentuh angka 20 persen pada akhir tahun 2022 (Gonthamaker: 2022). Dalam jangka pendek sanksi ekonomi ini tidak akan terlihat efektif untuk mendorong Rusia mengubah kebijakan mereka atas Ukraina. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan Rusia yang masih meneruskan invasi mereka sehingga perang tetap berlanjut. Bahkan sanksi dari barat ini kemudian memunculkan masalah baru dimana hubungan antara Rusia dengan Barat semakin memburuk sehingga mengurangi rasa kepercayaan dari pihak Rusia terhadap Barat. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan untuk upaya resolusi konflik antara Rusia dengan Ukraina karena kepercayaan Rusia yang menurun. Namun, dalam waktu yang cukup lama sanksi ini akan berdampak kepada penurunan devisa negara sehingga Rusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban ekonomi mereka sehingga akan berdampak standar hidup masyarakat akan menurun. Kondisi ini akan menyebabkan pada upaya gencatan senjata sehingga perjanjian damai yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dapat dirumuskan.

Akan tetapi, upaya resolusi konflik tadi harus diupayakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian, yaitu dengan meminta semua pihak untuk menahan diri dan kemudian menyediakan, menjembatani serta mendorong adanya dialog antara pihak – pihak terlibat berupa Rusia, Ukraina, NATO, Separatis Donbass serta Uni Eropa. Hal ini ditujukan untuk menemukan akar konflik yang mana menjadi inti mengapa konflik tersebut terjadi. Setelah diketahui akar masalah, maka kemudian dapat dirumuskan bersama untuk mencari solusi yang tepat dan sesuai dalam menangani konflik yang ada. Dalam hal ini, penggunaan cara – cara litigasi dan non litigasi harus diprioritaskan dibandingkan penggunaan metode *coercive*. Hal ini ditujukan untuk menghindari memburuknya situasi serta adanya peningkatan tensi. Setelah berhasil ditemukan sebuah resolusi yang tepat dan disetujui semua pihak, tahapan selanjutnya berupa *peacekeeping* harus dilakukan bekerja sama bersama pihak – pihak terkait untuk menjaga resolusi yang dibentuk dan disepakati. Lantas tahapan terakhir *peace building* yakni pengimplementasian konstruksi yang terbentuk dalam kesepakatan tersebut serta mengembalikan hubungan sebagaimana hubungan yang harmonis dan tidak berkonflik.

KESIMPULAN

Konflik Ukraina dan Rusia terjadi disebabkan hubungan yang kurang baik diantara keduanya dimana Rusia terlibat dalam berbagai urusan domestik Ukraina seperti yang terjadi di Krimea dan Donbass. Demikian Ukraina berupaya untuk melindungi keamanan wilayah dari ancaman Rusia dengan menjalin hubungan serta kerja sama bersama NATO dan Uni Eropa. Harapannya Ukraina dapat memperoleh keamanan dan terhindar dari Rusia yang mana bertindak sewenang – wenang terhadap Ukraina. Namun demikian, kedekatan hubungan antara Ukraina dan pihak barat justru memancing Rusia untuk bertindak lebih agresif. Penyebabnya adalah Rusia merasa semakin terancam dengan kehadiran barat di sekitar wilayah Rusia. Hal ini pula yang melatarbelakangi Rusia mencampuri urusan dalam negeri Ukraina. Sehingga demikian Rusia melakukan operasi militernya terhadap Ukraina pada tahun 2022. Akibatnya terjadi sebuah perang terbuka antara Rusia dan Ukraina dimana Rusia dalam hal ini sebagai negara yang melakukan penyerangan sedang Ukraina berupaya mempertahankan wilayahnya. Konflik yang terjadi memberikan dampak yang signifikan dimana bidang – bidang perekonomian hingga politik tidak dapat berjalan dan adanya korban jiwa yang berjatuhan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan peningkatan dalam upaya resolusi konflik untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa dan parahnya keadaan. Dalam hal ini, upaya resolusi yang memungkinkan dan sesuai adalah melalui litigasi dan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indriyani. (2022). "Parlemen Dunia Sepakat Menjadi Mediator Konflik Russia-Ukraina." *Media Indonesia*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/internasional/480205/parlemen-dunia-sepakat-menjadi-mediator-konflik-rusia-ukraina> pada 3 Juni 2022.
- Gierzack, Bartosz. (2020). "The Russo-Ukrainian Conflict". Diambil dari: https://www.researchgate.net/publication/349948624_The_Russo-Ukrainian_Conflict, pada 28 Maret 2022.
- Gonthamaker, Evgeny. (2022). "Russia Under Sanctions." *GIS*. Diakses dari <https://www.gisreportsonline.com/r/russia-sanctions/> pada 6 Juni 2022.
- Hidriyah, Sita. (2022). "ESKALASI KETEGANGAN RUSIA-UKRAINA". *Info Singkat*. Vol. 14. No. 4. Hal 9. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari-2022-229.pdf. Pada 27 Maret 2022.
- Jemadu, Aleksius. 2008. "Politik Global dalam Teori & Praktik". Yogyakarta: *Graha Ilmu*. Hal 208 diakses dari <https://repository.upnvj.ac.id/4910/3/BAB%20I.pdf>. Pada 27 Maret 2022.
- Lerch, Marika and Zamfir, Ionel. (2022). "International Court of Justice preliminary decision in Ukraine v Russia (2022)." *European Parliament*. Diakses dari [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS_ATA\(2022\)729350_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS_ATA(2022)729350_EN.pdf) pada 3 Juni 2022.
- Mayer, Bernard. (1946). "*The Dynamics of Conflict Resolution*." San Fransisco: Jossey Bass
- Purnawibowo, Stanov . (2019). "Analisis Pemangku Kepentingan Pada Tinggalan Arkeologi Bawah Air Di Desa Berakit". *Berkala Arkeologi SANGKHAKALA*. Vol. 22 No. 1.
- Ratner, Baz. (2021). "Russia has 90,000 troops near Ukraine border, Kyiv says". *Al-Jazeera*. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/3/russia-has-90000-troops-near-ukraine-border-kyiv-says>. Pada 27 Maret 2022.
- Ray, Michael. (2017) "Ukraine crisis". *Encyclopedia Britannica*, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/Ukraine-crisis>. Pada 27 March 2022.
- Riegent, Bernd. (2014). "Sejarah Perluasan NATO ke Eropa Timur". Diambil dari: <https://www.dw.com/id/sejarah-perluasan-nato-ke-eropa-timur/a-17528183>, pada tanggal 28 Maret 2022.
- Ron, Fisher. (2000). "Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution". *International Peace and Conflict Resolution, School of International Service, The American University*. Diakses dari http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/sources_of_conflict_and_methods_of_resolution.pdf. Pada 27 Maret 2022.

Suhardono, Wisnu . (2015). "Konflik Dan Resolusi". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 2 No. 1.

Yudha, Wisnu. (2007). "Reklamasi Singapura sebagai Potensi konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia- Singapura". *Global Strategis*. Vol.1 No.2.

Zeb, Khan, Ihsan Habibullah. (2017). "The Ukrainian Conflict and Options for Conflict Resolution". *Journal of European Studies*.

Dylan Carter. (2022) Ukraine-Russia peace talks conclude, no breakthrough. <https://www.brusselstimes.com/213618/ukraine-russia-peace-talks-conclude-no-breakthrough>

Dorian Jones. (2022). Ukraine-Russia Peace Talks Resume. <https://www.voanews.com/a/ukraine-russia-peace-talks-resume-/6511366.html>

Holly Ellyatt. (2022). Russia-Ukraine talks fail with no progress on cease-fire, safe passage for civilians. <https://www.cnbc.com/2022/03/10/russia-and-ukraine-peace-talks-in-turkey-what-you-need-to-know.html>

<https://www.aljazeera.com/news/2022/2/25/list-of-sanctions-on-russia-after-invasion>

<https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782>

Ukraine says talks in Turkey with Russia fail to make progress towards ceasefire. <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/ukraine-talks-turkey-russia-fail-progress-ceasefire>

Ukraine rules out any ceasefire deal that involves ceding territory to Russia. <https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/ukraine-russia-ceasefire-deal-territory-donbas>

NATO and Russia's Security Dilemma Within the European Union's Far Neighbors. https://www.researchgate.net/publication/312254846_NATO_and_Russia's_Security_Dilemma_Within_the_European_Union's_Far_Neighbors

RIA NOVO 2008. <https://sputniknews.com/20080531/108965213.html>

Britania Halgund. <https://www.britannica.com/topic/North-Atlantic-Treaty-Organization>

file:///C:/Users/HP/Downloads/NATO_and_Russias_Security_Dilemma_Within_the_Euro.pdf

<https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/15872680.pdf>

Michaelson. <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/the-world-is-waiting-for-good-news-russia-ukraine-peace-talks-press-on-in-turkey>

Pamuk. <https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-erdogan-says-intends-buy-another-russian-s-400-defence-system-cbs-news-2021-09-26/>

Cunningham. <https://moderndiplomacy.eu/2022/03/16/conflict-mediation-turkey-and-israel-as-mediators-in-the-russian-ukraine-war/>